



 **KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL** 

**HASIL PEMBAHASAN
PRA MUSRENBANGNAS TAHUN 2015**


PENDIDIKAN

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia
dan Kebudayaan


Jakarta, 28 April 2015

 **OUTLINE PEMBAHASAN** 

1. Isu Strategis Pembangunan Pendidikan 2016
2. Sasaran dan Arah kebijakan Tahun 2016
3. Lingkup sasaran nawacita terkait Pendidikan dan K/L yang berkontribusi
4. Hasil Pembahasan Kelompok Pendidikan
5. Sinkronisasi antar sektor dalam pencapaian target pembangunan pendidikan
6. Kesimpulan dan tindak lanjut.



Isu Strategis Pembangunan Pendidikan 2016



1. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar melalui Wajib Belajar 12 Tahun
2. Peningkatan Kualitas Pembelajaran
3. Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Reformasi LPTK
4. Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi
5. Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini
6. Peningkatan Keterampilan Kerja dan Penguatan Pendidikan Orang Dewasa
7. Peningkatan Pendidikan Keagamaan
8. Peningkatan Pendidikan Agama, Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Karakter untuk Mendukung Revolusi Mental
9. Peningkatan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan
10. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan




HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN




Indikator	2014 (Baseline)	2016	2019
▪ Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	8,1 (tahun) ¹⁾	8,5 (tahun)	8,8 (tahun)
▪ Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	94,1% ¹⁾	95,1%	96,1 %
▪ Prodi Perguruan Tinggi Minimal Terakreditasi B	50,4% ¹⁾	58,8%	68,4 %
▪ Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	68,7% ¹⁾	76,5%	84,2 %
▪ Persentase SMP/MT berakreditasi minimal B	62,5% ¹⁾	71,8%	81,0 %
▪ Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	73,5% ¹⁾	79,1%	84,6%
▪ Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B	48,2% ¹⁾	56,6%	65,0 %
▪ Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,84 ¹⁾	0,87	0,90
▪ Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,57 ¹⁾	0,58	0,60
Pendidikan Anak Usia Dini			
Angka Partisipasi PAUD	66,81	70,85	77,23
Pendidikan Dasar			
Angka Partisipasi Murni SD/MI	91,28	91,79	94,78
Angka Partisipasi Kasar SD/ MI/ SDLB/ Paket A	111,04	111,14	114,09
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	79,42	80,87	82,02
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	101,57	104,47	106,94
Pendidikan Menengah			
Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	55,26	60,84	67,48
Angka Partisipasi Kasar SMA/ MA/ SMK/ Paket C	79,22	85,51	91,63
Pendidikan Tinggi			
Angka Partisipasi Kasar PT	28,51	31,31	36,73

¹⁾ Baseline tahun 2013




ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SUBBIDANG PENDIDIKAN




1. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar, dan memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah berkualitas, antara lain melalui dukungan bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar;
2. Meningkatkan kualitas pembelajaran, melalui penguatan jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan; penguatan kurikulum dan pelaksanaannya; dan penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel;
3. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD).
4. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal, terutama pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
5. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru, serta jaminan hidup dan fasilitas pengembangan pengetahuan dan karir bagi guru di daerah khusus; dan
6. Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas serta relevansi dan daya saing pendidikan tinggi.


5




STRATEGI PERKUATAN SUBBIDANG PENDIDIKAN



1. Dalam rangka mendukung Wajib Belajar 12 Tahun:
 - a. meningkatkan cakupan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) terutama bagi anak usia sekolah yang belum/tidak pernah bersekolah atau tidak bersekolah lagi; dan
 - b. meningkatkan efektivitas mekanisme penyaluran bantuan melalui KIP.
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran:
 - a. Meningkatkan review terhadap pelaksanaan kurikulum yang sedang berjalan;
 - b. Mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran di dalam kelas;
 - c. Mengevaluasi sistem penilaian hasil belajar siswa; dan
 - d. Meningkatkan sinergi antara pelaksanaan akreditasi dengan peningkatan kualitas pendidikan



STRATEGI PERKUATAN SUBBIDANG PENDIDIKAN



3. Dalam rangka meningkatkan kualitas, pengelolaan dan penempatan guru:
 - a. Meningkatkan kualitas calon guru melalui sistem penjurangan mahasiswa LPTK yang selektif;
 - b. Melaksanakan Pendidikan Profesi Guru (PPG);
 - c. Melaksanakan pengembangan profesionalisme guru berkelanjutan dalam meningkatkan kemampuan, pemahaman, dan keterampilan pedagogis untuk efektivitas pembelajaran di kelas;
 - d. Meningkatkan pengelolaan, penempatan, dan pendistribusian guru dan tenaga kependidikan, melalui pengembangan master plan kebutuhan dan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah sesuai peraturan perundangan; dan
 - e. Melaksanakan penilaian kinerja guru
4. Dalam rangka meningkatkan daya saing pendidikan tinggi:
 - a. Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di perguruan tinggi yang lebih berorientasi pada kebutuhan industri dan pembangunan daerah;
 - b. Meningkatkan sinergi pelaksanaan penelitian dan pengembangan antar perguruan tinggi, dan kerjasama dengan industri dan lembaga litbang lainnya



Sasaran Nawa Cita dan K/L Yang Berkontribusi



Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia

No.	Sasaran Nawa Cita	K/L Berkontribusi
1.	Program Indonesia Pintar	1. Kemdikbud 2. Kemenag
2.	Wajib Belajar 12 Tahun	1. Kemdikbud 2. Kemenag
3.	Evaluasi Kurikulum dan UN	1. Kemdikbud
4.	Tunjangan Fungsional yang Memadai bagi Guru di Daerah Terpencil	1. Kemdikbud 2. Kemenag
5.	Fasilitasi Pengembangan Karir dan Keilmuan bagi Guru di Daerah Terpencil	1. Kemdikbud 2. Kemenag
6.	Subsidi perguruan tinggi negeri untuk pengembangan Iptek Unggulan	1. Kemristekdikti


Bidang	Jumlah Usulan Daerah	Usulan Dibahas		Usulan Disepakati		Jumlah Usulan tidak Dibahas	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Pendidikan	2.935	2.812	95,8%	2.614	89,1%	123	4,2%

Usulan yang tidak dibahas, antara lain adalah usulan yang pendanaannya tidak melalui Kementerian/Lembaga, misalnya:


- Pendanaan melalui transfer daerah: BOS SD, BOS SMP, tunjangan profesi guru PNSD
- Pendanaan melalui hibah langsung yang tidak masuk dalam DIPA Kementerian, misalnya PKP-SPM oleh EU

Sementara usulan lain yang tidak dibahas tapi masuk dalam anggaran Kementerian/Lembaga adalah KIP


REKAP KESEPAKATAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PRA-MUSRENBANGNAS 2015	
<p>➤ Dari total 2.935 usulan daerah di Kelompok Pendidikan, 2.614 usulan (89,1%) dapat diakomodir. Usulan tersebut terbagi atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Usulan yang pasti akan dipenuhi dari DIPA K/L, karena merupakan kegiatan prioritas dengan sasaran yang jelas, misalnya KIP dan BOS yang akan disediakan sesuai jumlah siswa sasaran yang memenuhi kriteria ➤ Usulan yang sama dengan menu kegiatan di K/L. Volume sasaran dan alokasi anggaran akan dibahas lebih lanjut. Misalnya: pembangunan unit sekolah baru (USB), bantuan operasional (BOP) PAUD, pendidikan keterampilan hidup, biaya operasional pendidikan kesetaraan Paket A/B/C, dsb ➤ Usulan yang tersedia menu kegiatan di K/L, namun juga termasuk dalam menu DAK. Daerah diharapkan memenuhi kebutuhannya dari DAK dan, apabila terdapat kekurangan anggaran, mengusulkannya ke K/L. Contoh: pembangunan ruang kelas baru (RKB), pembangunan perpustakaan dan laboratorium, rehabilitasi ruang kelas rusak, dsb. 	
<p>➤ Terdapat 179 usulan daerah (6,1%) yang tidak disepakati/ditolak dalam pembahasan. Usulan yang ditolak terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Usulan yang tidak sesuai dengan K/L dibahas dalam kelompok Pendidikan, misalnya: usulan untuk Kemenpora, Perpunas, Kemperin ➤ Usulan yang tidak ada dalam menu K/L dan diusulkan dibiayai dari APBD, misalnya: pembangunan pagar sekolah, penyediaan lapangan upacara, kendaraan operasional guru, dsb. 	
<p>➤ Sementara 19 usulan kegiatan (0,6%) yang memerlukan pembahasan lebih lanjut (<i>dispute</i>), dimana K/L dan pemerintah daerah sepakat bahwa kegiatan tersebut merupakan inovasi daerah yang bagus, namun masih perlu disiapkan menu kegiatannya di K/L. Misalnya sekolah keberbakatan, pembangunan workshop bersama terutama untuk SMK Swasta.</p>	10




Hasil Pembahasan Kelompok Pendidikan




- Usulan dalam aplikasi e-musrenbang sesuai K/L:
 - Kemdikbud sebanyak 2.866 usulan
 - Kemenag sebanyak 57 usulan
 - Kemristekdikti sebanyak 10 usulan
 - Kemperin sebanyak 2 usulan
- Dalam pembahasan, daerah sering menyampaikan usulan yang belum dimasukkan dalam aplikasi. Usulan tersebut dicatat dalam catatan pembahasan dan menjadi satu kesatuan dengan Berita Acara Kesepakatan




Efektivitas Sinkronisasi



- Pembahasan dengan pola multilateral dengan menghadirkan beberapa K/L terkait mendorong upaya mengatasi masalah-masalah yang multi sektor secara tuntas dan terintegrasi
- Ketidak hadirannya K/L tertentu menjadi hambatan dalam upaya menuntaskan pemenuhan kebutuhan usulan daerah
- Peran provinsi perlu ditingkatkan dalam menyeleksi usulan kabupaten/kota yang akan disampaikan ke Pusat, sehingga lebih fokus dan tidak tumpang tindih dengan usulan dari Provinsi sendiri.
- Dalam menyampaikan usulan, daerah perlu mempersiapkan data pendukung mengenai volume sasaran yang dapat dibiayai melalui sumber pendanaan selain K/L. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan RKB, daerah diharapkan dapat memetakan berapa yang akan didanai melalui DAK kab/kota, berapa yang dapat didanai oleh Provinsi melalui bantuan keuangan, dan berapa sisanya yang akan diusulkan untuk didanai oleh Pusat.



Kesimpulan dan Tindak Lanjut



- Pola pembahasan multilateral mendorong upaya pemenuhan kebutuhan daerah secara tuntas dan terintegrasi
- Pemerintah daerah melalui Bappeda Provinsi menyampaikan pemetaan usulan kegiatan (volume sasaran dan perkiraan sumber pendanaan) ke K/L.
- K/L akan memperbaiki Renja K/L 2016 dengan mempertimbangkan usulan daerah dan ketersediaan Pagu Indikatif 2016
- Hasil Pra-Musrenbangnas menjadi masukan dalam penyempurnaan RKP 2016



TERIMA KASIH